



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap
Perempuan dan Anak Perempuan Liberia**

Skripsi

Oleh

Pita Rini Fajrian Ramadhani

2014330080

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap
Perempuan dan Anak Perempuan Liberia**

Skripsi

Oleh

Pita Rini Fajrian Ramadhani

2014330080

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Pita Rini Fajrian Ramadhani
Nomor Pokok : 2014330080
Judul : Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India
terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Liberia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 7 Juni 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPPM, Ph.D.

: 

Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pita Rini Fajrian Ramadhani
NPM : 2014330080
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Liberia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Juni 2018



Pita Rini Fajrian Ramadhani

ABSTRAK

Nama : Pita Rini Fajrian Ramadhani

NPM : 2014330080

Judul : Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Liberia

Dengan tumbuhnya kesadaran bahwa dibutuhkan solusi yang berbeda untuk perempuan dan anak-anak perempuan di wilayah pasca konflik— yang sebagian besar mengalami trauma dengan kehadiran laki-laki, membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan peningkatan partisipasi perempuan di sektor keamanan. PBB kemudian memutuskan untuk mendatangkan *Female Formed Police Unit* (FFPU) pertama dari India ke misi pemeliharaan perdamaian di Liberia pada tahun 2007, yang dianggap sebagai pencapaian sukses untuk sektor keamanan Liberia dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk penelitian ini adalah: bagaimana dampak kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan Liberia? Penelitian ini ditulis dengan mengaplikasikan metode kualitatif dan teknik studi literatur. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan perspektif feminisme liberal dan konsep *empowerment*.

Melalui perspektif feminisme liberal, penelitian menjelaskan bagaimana FFPU India membantu mendobrak stereotip maskulin dalam sektor keamanan untuk membantu meningkatkan angka partisipasi perempuan di dalam *Liberia National Police* (LNP). Lalu, konsep *empowerment* digunakan untuk menjelaskan bagaimana FFPU India memfasilitasi jalan untuk mencapai pemberdayaan perempuan Liberia dalam 3 aspek: hak-hak untuk berpartisipasi dalam institusi keamanan, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang relatif baik.

Kata Kunci: *Female Formed Police Unit*, Feminisme Liberal, *Empowerment*

ABSTRACT

Name : Pita Rini Fajrian Ramadhani

NPM : 2014330080

Title : The Impact of Indian Female Formed Police Unit Deployment for
Liberian Women and Girls

Realising the need to provide different solutions for women and girls in a post-conflict country – whom mostly traumatized by the presence of men, The United Nations promoted the need to increase women's participation in the security sector. The UN then decided to deploy the first Female Formed Police Unit (FFPU) from India to Liberia peacekeeping mission in 2007, which now is seen as a groundbreaking achievement for both, the Liberian security sector and women's empowerment. Therefore, the research question for this thesis is: how did the deployment of Indian FFPU impact the empowerment for Liberian women and girls? This research was written by applying the qualitative method and the technique of literature study. To answer the research question, the liberal feminism perspective and the concept of empowerment are applied.

From the liberal feminism perspective, the research explains how the Indian FFPU helped to break the stereotype of the masculine identification in the security sector to help raising the number of women's participation in the Liberia National Police (LNP). The concept of empowerment is applied to explain how the Indian FFPU facilitated the ways to achieve Liberian women's empowerment in three aspects: the rights to participate in the security institution, access to education, and decent and well-paid employment.

Key words: Female Formed Police Unit, Liberal Feminism, Empowerment

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Liberia**. Penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana upaya dan dampak yang ditimbulkan oleh kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap masyarakat Liberia, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan, dengan menggunakan perspektif feminisme liberal dan konsep *empowerment*. Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan inspirasi untuk terbukanya pembahasan lebih banyak mengenai keikutsertaan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian di wilayah pasca konflik.

Bagaimanapun juga, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dari segi penulisan maupun argumentasi. Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini, maupun sebagai masukan untuk penulis ke depannya. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang akan membaca.

Bandung, 31 Mei 2018

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Puji syukur kepada Allah swt, yang karena tuntunan dan kehendak-Nya, saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat lulus studi jenjang sarjana. Terima kasih telah mendengarkan doa-doa yang telah saya panjatkan selama ini dan membantu mewujudkannya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta sebagai sumber dukungan lahir dan batin terbesar, Mama dan Bapak, terima kasih atas segala doa dan motivasi yang senantiasa tercurahkan kepada saya tanpa henti dan tidak pernah meragukan apapun pilihan saya untuk melakukan studi di jurusan ini. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, menjadi langkah awal bagi saya untuk terus membahagiakan Mama dan Bapak.
3. Kepada saudara-saudaraku tersayang, Mbak Ajeng dan Sonia, terima kasih telah memberikan masukan-masukan agar saya terus semangat sesegera mungkin menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menjadi teman di kampus dan di rumah, karena kalianlah sungguh banyak kenalan dan kesempatan yang saya miliki di Unpar.
4. Kepada dosen dan pembimbing terbaik yang menjadi idola saya, Elisabeth A. S. Dewi, Ph.D, atau Mbak Nophie. Terima kasih atas segala arahan, masukan, dan kesabaran yang telah diberikan selama ini, baik selama penulisan skripsi maupun perkuliahan.
5. Kepada dosen penguji, Mbak Sylvia dan Bang Atom, terima kasih atas segala masukan yang diberikan saat sidang skripsi sehingga membuat penulisan penelitian ini menjadi lebih baik lagi.
6. Kepada teman-teman seangkatan yang menemani kehidupan selama kuliah: 1) Ixi dan Silvia yang benar-benar menjadi teman sehati seperjuangan *from day one until the end*; 2) Claudia yang menjadi teman di segala ke-*absurd*-an dan kenekatan hidup selama perkuliahan; 3) Dea sebagai teman satu delegasi *CSO from IDG*, tanpa senda gurau dan humor sarkastiknya prakdip tidak akan terasa sesantai dan menyenangkan ini.

7. Kepada teman-teman *Finish Strong* – Dyaning, Anggia, Yulfitri, Dinda, Adella – hidup perkuliahan menjadi begitu berwarna. Kalian benar-benar menjadi orang yang selalu siap memberikan saran dan bantuan dalam suka duka. *I am forever grateful that I met you all. Thank you for the smiles and tears, the ups and downs!*
8. Kepada teman sepermainan dengan julukan *Gossip Girls* – Ghea, Elvira, Putri, Ninis, Ulfa – dan Farid, teman sejak SMA yang entah kenapa saya selalu merasa nyaman dengan kalian seakan keluarga nomor dua. *Thank you for giving me your warmest and endless support!*
9. Kepada sahabat terdekat lain di luar perkuliahan, yang bisa membuat saya merasa menjadi diri saya sendiri – Salsa, Dita, Fasya, terima kasih atas segala-galanya (yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu). *Your sincerity in friendship means the world to me that I hope will only grow stronger from time to time.*
10. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa HI UNPAR Angkatan 2014!
11. Terima kasih kepada LISTRA yang telah memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.
12. Terima kasih kepada *Explosions in the Sky*, berkat musik instrumentalnya yang sungguh luar biasa dan selalu menemani proses penulisan skripsi ini, menulis menjadi tidak membosankan dan berbagai ide mengalir dengan mudah.
13. Seluruh pihak yang namanya tidak tercantumkan di dalam ucapan terima kasih ini, terima kasih atas dukungan dan doanya sekecil apapun, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian semua.

Pita Rini Fajrian Ramadhani

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Diagram.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Singkatan.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.2.1. Pembatasan Masalah	10
1.2.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian	12
1.4. Kajian Literatur	12
1.5. Kerangka Pemikiran	16
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1. Metode Penelitian	21
1.6.2. Jenis Penelitian	22
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	22

1.7. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN DAN DISPARITAS GENDER DI DALAMNYA	25
2.1. Pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian	25
2.2. Permasalahan Disparitas Gender di dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian	30
2.2.1. Perbandingan Laki-Laki dan Perempuan dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian	30
2.2.2. Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Sebagai Permasalahan dalam Misi Perdamaian	35
BAB III TERBENTUKNYA FFPU DAN KONTRIBUSINYA DALAM PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN LIBERIA.....	42
3.1. Pembentukan <i>United Nations Mission in Liberia</i> (UNMIL).....	42
3.2. Permasalahan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual oleh Pasukan Pemelihara Perdamaian di Liberia	47
3.3. Pembentukan dan Kedatangan <i>Female Formed Police Unit</i> (FFPU) di Liberia	55
3.3.1. Awal Mula Pembentukan FFPU di India.....	55
3.3.2. Kedatangan FFPU	56
3.3.3. Perkembangan Peran FFPU	58
BAB IV ANALISIS DAMPAK KEDATANGAN <i>FEMALE FORMED POLICE UNIT</i> INDIA KE LIBERIA DENGAN PERSPEKTIF FEMINISME LIBERAL.....	63
4.1. Analisis Dampak Kedatangan <i>Female Formed Police Unit</i> dengan Perspektif Feminisme Liberal	63
4.1.1. <i>Compassion</i>	69
4.1.2. <i>Competence</i>	70
4.1.3. <i>Consensus</i>	72
4.1.4. <i>Cooperating</i>	73

4.1.5. <i>Community</i>	75
4.2. Dampak Kedatangan <i>Female Formed Police Unit</i>	77
4.2.1. Dampak kepada Sektor Pendidikan Liberia.....	77
4.2.2. Dampak kepada Sektor Keamanan Liberia.....	79
4.2.2.1. Dampak kepada Perubahan Stigma Dominasi Laki-laki di dalam Sektor Keamanan	79
4.2.2.2. Dampak kepada Keamanan dan Ketertiban Wilayah Liberia	80
4.2.3. Dampak kepada Sektor Ekonomi bagi Perempuan Liberia	83
4.2.4. Dampak kepada Tingkat Partisipasi Perempuan di dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Lainnya	85
BAB V KESIMPULAN	90
Daftar Pustaka	xv

Daftar Tabel

Tabel 1	Total Responden Terlibat dalam Seks Transaksional dengan Personel PBB dan Laki-Laki Secara Umum.....	51
---------	--	----

Daftar Diagram

Diagram 1	Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan dalam Pasukan Perdamaian di Beberapa Negara di Afrika (2006).....34
-----------	---

Daftar Gambar

Gambar 1	Tipe-Tipe <i>Sexual Exploitation and Abuse</i>	37
Gambar 2	Model <i>Power as Empowerment</i>	68

Daftar Singkatan

AFELL	<i>Association of Female Lawyers of Liberia</i>
BPFA	<i>Beijing Platform for Action</i>
CPC	<i>Civil Protection Component</i>
CRPF	<i>Central Reserve Police Force</i>
DDR	<i>Disarmament, Demobilization, and Reintegration</i>
ECOMIL	<i>ECOWAS Mission in Liberia</i>
ECOMOG	<i>Economic Community of West African States Monitoring Group</i>
ECOWAS	<i>Economic Community of West African States</i>
FFPU	<i>Female Formed Police Unit</i>
FPU	<i>Formed Police Unit</i>
GAPW	<i>Global Action to Prevent War</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
IMT	<i>International Monitoring Team</i>
INPFL	<i>Independent National Patriotic Front of Liberia</i>
IPS	<i>Indian Police Service</i>
LNP	<i>Liberia National Police</i>
LURD	<i>Liberians United for Reconciliation and Democracy</i>

MINUSTAH	<i>The United Nations Stabilization Mission in Haiti</i>
MODEL	<i>Movement for Democracy in Liberia</i>
MONUC	<i>United Nations Observer Mission in the Democratic Republic of the Congo</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NPFL	<i>National Patriotic Front of Liberia</i>
OAU	<i>Organisation of African Unity</i>
OIOS	<i>UN Office of International Oversight Services</i>
PBB	<i>Perdamaian Bangsa-Bangsa</i>
SCUK	<i>Save the Children UK</i>
SEA	<i>Sexual Exploitation and Abuse</i>
SMC	<i>Standing Mediation Committee</i>
UNAMSIL	<i>United Nations Mission in Sierra Leone</i>
UNDOF	<i>United Nations Disengagement Observer Force</i>
UNDPKO	<i>United Nations Department of Peacekeeping Operations</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	<i>The United Nations Children's Fund</i>
UNIFIL	<i>United Nation Interim Force in Lebanon</i>
UNMEE	<i>United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea</i>
UNMIK	<i>United Nations Mission in Kosovo</i>
UNMIL	<i>United Nations Mission in Liberia</i>

UNOCI	<i>United Nations Operation in Côte d'Ivoire</i>
UNOMIL	<i>United Nations Observer Mission in Liberia</i>
UNPOL	<i>The United Nations Police</i>
UNSCR	<i>United Nations Security Council Resolutions</i>
UNTSO	<i>United Nations Truce Supervision Organization</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Misi pemeliharaan perdamaian merupakan implementasi yang lebih konkret dari wacana keamanan kolektif di wilayah pasca konflik. Berdasarkan Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah tanggung jawab Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk merangkul negara-negara anggota dan negara tujuan agar bertindak secara kolektif dalam penyelesaian sengketa atau pemulihan stabilitas negara pasca konflik yang masih belum memiliki kemampuan mandiri untuk menjaga keamanan negara dan warga negaranya.¹ Melihat banyaknya kekerasan yang terjadi, Dewan Keamanan PBB kemudian mendiskusikan persoalan misi untuk ‘melindungi masyarakat sipil’, yang berarti sinyal bahwa operasi pemeliharaan perdamaian harus dilakukan saat kekerasan mengancam masyarakat sipil. Salah satu contoh pionir misi penjagaan perdamaian adalah UNAMSIL (*United Nations Mission in Sierra Leone*) yang dilakukan pada bulan Oktober 1999 berdasarkan Resolusi 1270.²

Salah satu contoh kondisi yang dapat dijadikan alasan pembentukan sebuah pasukan pemeliharaan perdamaian adalah saat melihat adanya suatu

¹ “What is Peacekeeping,” *United Nations Peacekeeping*, diakses pada 4 Juli, 2018, <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>.

² V. Holt, G. Taylor, dan M. Kelly, *Protecting Civilians in the Context of UN Peacekeeping Operations: Successes, Setbacks and Remaining Challenges* (New York: United Nations, 2009), 36.

negara yang kesulitan mencapai stabilitas, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, setelah konflik telah usai. Negara dengan kondisi tersebut akan sangat rentan terhadap terulangnya kembali konflik atau bahkan menjadi sebuah *failed state*. Afrika dapat menjadi sebuah contoh benua yang menempati skor tertinggi di dunia dalam hal *fragile state index*. Sebagian besar negara-negara di Afrika menempati tingkat *high warning*, *alert*, *high alert*, dan *very high alert* dalam indeks tersebut. Sebagai contoh, Somalia yang pernah memiliki status sebagai sebuah *failed state* sebelum tahun 2016³, memiliki skor 114,0. Data tersebut juga menunjukkan Somalia menempati urutan ke-1 sebagai negara paling rentan menjadi sebuah *failed state*.⁴

Perlu diketahui bahwa tingkat kerentanan tersebut biasanya berakar dari konflik di dalam negara, bukan antar negara, seperti yang terjadi di banyak negara di Afrika. Permasalahan dimulai karena negara-negara di Afrika mewarisi prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan dari penjajahnya dahulu. Namun, penduduk Afrika sendiri tidak mampu beradaptasi dengan sistem tersebut secara cepat untuk diterapkan menjadi sistem baru mereka sebagai negara merdeka. Negara-negara Afrika biasanya dibiarkan begitu saja sesaat setelah mereka merdeka, dengan asumsi bahwa dengan begitu akan memberikan negara baru tersebut kebebasan membentuk lembaga eksekutif yang kuat sesuai dengan keinginan mereka untuk

³ Menurut Nicholas Kay sebagai representatif Sekjen PBB di Somalia, Somalia saat ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah *failed state*, melainkan *recovering fragile country*. Elias Meseret, "UN official: Somalia is no longer a failed state," *Business Insider*, dimodifikasi terakhir 22 Desember, 2015, <http://www.businessinsider.com/ap-un-official-says-somalia-is-no-longer-a-failed-state-2015-12/?IR=T>.

⁴ *Failed state* adalah kondisi sebuah negara di mana negara tidak mampu lagi menjalankan fungsi dasarnya seperti dalam sektor pendidikan, keamanan, atau pemerintahan, yang biasanya disebabkan oleh kekerasan atau kemiskinan yang ekstrem.

melakukan pembangunan dan integrasi. Namun, banyak dari mereka justru berubah menjadi pemimpin otoriter dan dengan kepemimpinan yang disfungsi. Keadaan tersebut kemudian yang mendorong timbulnya konflik untuk menggulingkan kepala pemerintahan atau kelompok penguasa.⁵ Instabilitas yang terjadi pasca terjadinya konflik kemudian mendorong munculnya inisiatif dari PBB untuk meluncurkan sebuah misi pemeliharaan perdamaian.

Dalam perjalanannya, banyak misi perdamaian yang sudah dilakukan oleh PBB dengan konteks strategis yang juga telah mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu. Di awal era terbentuknya PBB, misi pemeliharaan perdamaian hanya bertujuan untuk menjaga proses gencatan senjata, menjaga situasi lapangan agar ‘goncangan’ tidak terulang, dan memberi dorongan dukungan untuk segera melakukan resolusi konflik secara damai. Namun, tujuan misi pemeliharaan kemudian bergeser ke arah yang lebih multidimensional demi menjamin terwujudnya upaya perdamaian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan bergesernya tujuan, tugas pasukan pemelihara perdamaian pun kemudian bertambah pula, seperti membantu pendirian institusi yang berkelanjutan, pengawasan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), reintegrasi mantan kombatan, re-organisasi militer atau kepolisian, dan lain sebagainya.⁶

Berbicara situasi di wilayah pasca konflik, sebenarnya perempuan biasanya menjadi mayoritas populasi masyarakat yang selamat, karena banyak

⁵ Goran Hyden, *African Politics in Comparative Perspective: 2nd Edition* (New York: Cambridge University Press, 2013), 20.

⁶ “Our History,” *United Nations Peacekeeping*, diakses pada 19 Desember 2017, <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>.

laki-laki yang terbunuh atau pergi selama konflik berlangsung. Di sini lah kemudian peran serta perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dianggap penting. Personel pemelihara perdamaian perempuan mampu melaksanakan peran penting yang tidak bisa dilakukan oleh personel laki-laki. Sebagai contoh pertama, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan selama konflik maupun pasca konflik akan segan untuk melaporkan apa yang terjadi kepada personel keamanan laki-laki karena merasa tidak nyaman dan memiliki trauma terhadap laki-laki. Sebagai contoh kedua adalah situasi di sebuah negara Muslim, di mana personel laki-laki dilarang untuk menyentuh perempuan yang beragama Islam. Padahal, pemeriksaan terhadap perempuan juga dianggap penting karena banyak perempuan yang juga terlibat sebagai kombatan. Oleh karena itu, kemudian kehadiran perempuan sebagai personel pasukan pemelihara perdamaian semakin dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas upaya pemeliharaan perdamaian itu sendiri.⁷

Isu tentang perempuan dalam hal perdamaian dan keamanan kemudian mulai mendapatkan perhatian besar saat diadakannya *The Fourth World Conference on Women* di Beijing pada tahun 1995. Konferensi ini merupakan salah satu konferensi terbesar yang pernah diadakan oleh PBB. Dalam konferensi tersebut, PBB berhasil mengumpulkan 189 negara, 4.000 jurnalis, serta lebih dari 4.000 *non-governmental organizations* sebagai representatif, untuk mendiskusikan komitmen dalam mempromosikan kesetaraan perempuan. Konferensi ini berhasil

⁷ "International Issues in Social Work and Social Welfare," *CQ Researcher* (California: Sage Publications, 2010), 60.

mengadopsi *Beijing Platform for Action* (BPFA) yang menekankan 12 isu kritis.⁸ Salah satu isu yang menjadi perhatian penelitian ini adalah “*Women in Armed Conflict*” yang menyerukan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik, serta perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok lanjut usia dalam konflik bersenjata.⁹

PBB menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa perempuan dan laki-laki terdampak oleh konflik dengan sebab dan akibat yang berbeda, sehingga perlu adanya pemahaman akan upaya perdamaian yang berbeda. Dengan menyadari dan mengintegrasikan perbedaan-perbedaan tersebut ke dalam segala aspek operasional PBB dengan perspektif gender, dipercaya mampu menyukseskan upaya pemeliharaan perdamaian PBB. Mengikuti kesuksesan BPFA, pada tanggal 31 Oktober tahun 2000, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengadopsi Resolusi 1325 (UNSCR 1325) mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Resolusi 1325 merupakan resolusi pertama PBB yang menyerukan dampak konflik bersenjata yang tidak proporsional dan berbeda pada perempuan.¹⁰

Resolusi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai dampak yang dapat ditimbulkan konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Namun, lebih dari itu, resolusi ini

⁸ “Historic Overview on the World Conferences on Women,” *United Nations - Non-governmental Liaison Service*, diakses pada 13 September, 2017, https://www.un-ngls.org/index.php/un-ngls_news_archives/2009/2524-historic-overview-on-the-world-conferences-on-women.

⁹ World Conference on Women, Report of the Fourth World Conference on Women (Beijing, Cina 4-15 September 1995), (New York: United Nations, 1996), hlm. 56, diakses pada 13 September, 2017, <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf>.

¹⁰ “Empowering Women,” *United Nations Peacekeeping*, diakses pada 4 Juli, 2018, <https://peacekeeping.un.org/en/empowering-women>.

juga berupaya menyerukan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam proses dan misi pemeliharaan perdamaian di wilayah pasca konflik bersenjata.¹¹ Dengan diadopsinya resolusi tersebut, isu-isu ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional semakin diberikan perhatian khusus, seperti kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap krisis kemanusiaan, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual. Resolusi ini juga diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan partisipasi perempuan sebagai personel dalam upaya pemeliharaan perdamaian. Berbicara mengenai komposisi personel dalam pasukan pemeliharaan perdamaian, banyak misi perdamaian yang telah dilakukan oleh PBB dengan komposisi laki-laki dan perempuan dalam pasukan yang berbeda-beda. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru tidak mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh PBB selama ini melalui pengadopsian Resolusi 1325. Seiring berjalannya waktu setelah pengadopsian Resolusi 1325, misi-misi perdamaian yang telah dilakukan oleh PBB justru masih banyak didominasi oleh laki-laki.

Pada tahun 2007, ada sekitar delapan belas misi penjagaan perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Menurut data statistik gender yang dirilis oleh PBB pada bulan Januari 2007, menunjukkan bahwa, dari total 72.784 orang di dalam pasukan, ada sejumlah 98 persen orang laki-laki dan 2 persen perempuan.¹² Medan konflik memang dianggap sebagai ranah yang keras. Sehingga maskulinitas – dalam hal ini merujuk pada laki-laki – dianggap lebih berguna karena mampu mendukung kemampuan aksi militer, kemampuan menggunakan

¹¹ Louise Olsson dan Theodora-Ismene Gizelis, “Gender, Peace, and Security: Implementing UN Security Council Resolution 1325,” (London: Routledge, 2015), 1.

¹² *Gender Statistics*, United Nations Peacekeeping, diakses pada 3 September, 2017, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml>.

persenjataan, berperang, membunuh, dan ‘rela mati’.¹³ Hal tersebut kontras dengan pandangan terhadap perempuan di tengah konflik. Perempuan yang turut bergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian umumnya tetap dianggap akan bertindak secara ‘feminin’ sesuai dengan asumsi karakteristik yang dimiliki perempuan, seperti bertindak berdasarkan emosi atau perasaan, perhatian, dan lembut.¹⁴ Sifat-sifat yang telah identik melekat pada perempuan tersebut tidak dianggap salah, namun dianggap tidak cocok jika harus menjadi pelindung di medan pasca konflik yang keras. Padahal, dengan diadopsinya Resolusi 1325 yang ingin meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam upaya perdamaian, seharusnya juga mampu dibuktikan oleh PBB dalam implementasi di lapangan tanpa menghiraukan stereotip gender yang tumbuh di masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Liberia, sebagai sebuah negara yang cukup lama mengalami konflik bersenjata, akhirnya memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis yang diharapkan mampu membawa negaranya ke masa depan yang lebih baik. Walaupun sudah mencapai perdamaian, Liberia tentu masih memerlukan bantuan untuk mampu menjamin keamanan publik dan nasional. Dalam hal ini, PBB kemudian memberikan bantuan pada Liberia melalui misi perdamaian bernama *United Nations Mission in Liberia* (UNMIL) yang sudah mulai beroperasi sejak

¹³ Hannah Wright, *Masculinities, Conflict and Peacebuilding: Perspectives on Men through a Gender Lens* (London: Saferworld, 2013), 6.

¹⁴ G. Heathcote dan D. Otto, ed., *Rethinking Peacekeeping, Gender Equality and Collective Security: Thinking Gender in Transnational Times*, 1st ed (London: Palgrave Macmillan, 2014), 190.

tahun 2003.¹⁵ Walaupun Liberia mendapatkan banyak bantuan dari mitra-mitranya, tentu saja masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam upaya pembangunan kembali (*rebuilding*) dan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*), terutama dalam hal keamanan nasional, yang termasuk di dalamnya keamanan individu masing-masing warga negara.

Misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB seharusnya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang pasca perang dengan mencegah terjadinya ‘penularan’ konflik ke area yang lebih besar dan mengurangi jumlah korban di medan konflik. Dibalik fakta betapa krusialnya peran pasukan perdamaian, banyak bermunculan kontroversi mengenai serangkaian kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian laki-laki. Salah satu bentuknya adalah seks transaksional, di mana adanya pertukaran untuk mendapatkan uang, imbalan/bantuan, dan hadiah dengan seks. Hal ini tentu mampu membahayakan berbagai aspek keamanan pula, seperti kesehatan publik dan pembangunan sosial serta ekonomi.¹⁶

Sebagai negara yang baru saja keluar dari situasi penuh konflik dan kekerasan, Liberia memiliki kepercayaan diri dan rasa keamanan yang sangat rendah dan pesimistik. Situasi tersebut kemudian semakin dipersulit dengan berbagai kekerasan dan eksploitasi seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak pasca konflik oleh pasukan perdamaian yang seharusnya memberikan perlindungan dan harapan baru. Banyak kasus kekerasan dan eskplotasi seksual

¹⁵ “Support for the Implementation of the Peace Process,” *United Nations*, diakses pada 13 September, 2017, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/>.

¹⁶ B. Beber, M. Gilligan, J. Guardado, & S. Karim, “Peacekeeping, Compliance with International Norms, and Transactional Sex in Monrovia, Liberia,” *International Organization* 71 (1) (2016): 2.

berbasis gender terjadi di Liberia, baik itu dilakukan oleh laki-laki pada umumnya atau personel pemelihara perdamaian secara khusus.

Di Liberia, ada lebih dari 12.000 personel pemelihara perdamaian PBB yang ditempatkan di sana sebagai pasukan UNMIL. Satu per lima dari pasukan tersebut ditempatkan di Monrovia, yaitu ibu kota dari Liberia. Di Monrovia sendiri, ada lebih dari setengah perempuan dengan kisaran umur 18-30 tahun pernah terlibat dalam seks transaksional, dan sebagian besar dari kasus tersebut (sekitar 58.000 perempuan) melakukannya dengan personel penjaga perdamaian PBB.¹⁷ Tidak hanya itu, sebelumnya di tahun 2004, terdapat laporan PBB yang juga mengkritisi pasukan perdamaian di Liberia, Kongo, dan Haiti atas pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dengan menukar makanan dan uang dengan seks. Pada tahun 2005 juga terdapat laporan mengenai 47 personel pasukan perdamaian di Liberia yang dituduh melakukan pelecehan seksual.¹⁸

Pada tahun 2005, seorang representatif dari *The United Nations Children's Fund* (UNICEF)¹⁹ juga menyatakan bahwa pasukan pemelihara perdamaian di Liberia rutin terlibat aktivitas seksual – protitusi, pemaksaan hubungan seksual, dan pornografi – dengan perempuan setempat semuda 12 tahun.²⁰ Hal utama yang mendorong perempuan Liberia untuk terpaksa melakukan hal tersebut adalah kemiskinan, di mana 80 persen populasi Liberia memiliki pendapatan kurang dari

¹⁷ *Ibid.*, 3.

¹⁸ Doreen Carvajal, "A Female Approach to Peacekeeping," *The New York Times*, dimodifikasi terakhir 22 Maret, 2010, <http://www.nytimes.com/2010/03/06/world/africa/06iht-ffpeace.html?pagewanted=all>.

¹⁹ UNICEF merupakan sebuah program dibawah naungan PBB yang membantu menyediakan pendampingan kemanusiaan dan pembangunan kepada anak-anak dan para ibu di negara-negara berkembang.

²⁰ Colum Lynch, "U.N. Faces More Accusations of Sexual Misconduct," *Washington Post*, diakses pada 26 Maret, 2018, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A30286-2005Mar12.html>.

50 sen per hari. Keadaan tersebut membuat masyarakat Liberia, termasuk perempuan, dimanipulasi untuk melakukan berbagai hal dengan balasan barang atau jasa.²¹ Berdasarkan permasalahan tersebut dan kesulitan dalam memotong rantai permasalahannya, muncul kesadaran untuk mendatangkan personel perempuan yang dianggap mampu merespon laporan atas kekerasan dan eksploitasi seksual secara lebih efektif.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas bagaimana dampak kedatangan pasukan penjaga perdamaian ke Liberia pasca konflik. Pasukan yang diteliti hanyalah pasukan *Female Formed Police Unit* (FFPU) pertama yang berasal dari India dan berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walaupun UNMIL memiliki personel perempuan dari negara lain, penulis hanya berfokus pada FFPU India karena merupakan pasukan polisi pertama dalam sejarah PBB yang komposisinya terdiri dari perempuan secara keseluruhan, sehingga kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh FFPU India lebih terlihat dan lebih mudah untuk dianalisa. Pembatasan waktu dalam penelitian mengenai FFPU India telah dibatasi dari tahun 2007 sampai pada tahun 2016. Tahun 2007 adalah tahun kedatangan *Female Formed Police Unit* dari India untuk pertama kalinya ke Liberia. Penulisan penelitian berakhir dalam lingkup waktu tahun 2016 di mana saat berakhirnya masa kerja personel penjaga perdamaian perempuan tersebut di Liberia.

²¹ "Daddy Wore a Blue Helmet," *The Economist*, diakses pada 26 Maret, 2018, <https://www.economist.com/node/3892222>.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini akan disusun untuk menjawab pertanyaan: bagaimana dampak kedatangan *Female Formed Police Unit* India terhadap pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan Liberia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui misi perdamaian mampu memberi dampak terhadap masyarakat Liberia. Melalui penelitian ini, penulis akan menjawab pertanyaan tersebut melalui pembahasan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana dampak keterlibatan *Female Formed Police Unit* India dalam misi perdamaian mampu memberikan dampak pada Liberia, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan Liberia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap, penelitian ini mampu melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian, serta menambah pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai berbagai kasus, teori, dan pendekatan yang telah ditempuh dan dipelajari penulis selama masa studi. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang ingin melakukan kajian akademis mengenai pengaruh pasukan pemelihara perdamaian perempuan terhadap negara tujuan, khususnya di tengah kawasan pasca konflik. Terakhir, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan inspirasi pada semua perempuan untuk berani melawan tekanan sosial dengan mengambil contoh studi kasus perempuan di Liberia yang juga telah diinspirasi oleh pasukan perdamaian India.

1.4. Kajian Literatur

Dalam melakukan pencarian data untuk penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur lain yang serupa dalam hal mengkaji tentang perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Literatur pertama berjudul *Just Add Women and Stir?* adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Sahana Dharmapuri dan diterbitkan di dalam jurnal berjudul *Parameters Vol. 41 Issue 1* pada tahun 2011.²² Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya penyertaan peran perempuan dalam misi perdamaian dan keamanan karena dapat meningkatkan keefektifan kerja dalam tiga hal, yaitu pengumpulan informasi,

²² Sahana Dharmapuri, "Just Add Women and Stir?" *Parameters* 41 no. 1 (2011): 56-70, di akses dari <https://search.proquest.com/docview/886828355?accountid=31495> pada 10 Oktober, 2017.

peningkatan kredibilitas, dan kekuatan perlindungan yang lebih baik. *Pertama*, dalam hal pengumpulan informasi, tentara perempuan memiliki kapabilitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama jika berada di wilayah yang konservatif secara budaya. *Kedua*, dalam hal kredibilitas, tentara perempuan dirasa memiliki keinginan yang lebih rendah dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan dirasa lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat lokal, terutama dalam hal pelaporan kekerasan seksual. *Ketiga*, menurut penelitian PBB terhadap gender dan misi perdamaian, saat setidaknya terdapat 30 persen perempuan dalam pasukan perdamaian, keikutsertaan perempuan lokal dalam upaya perdamaian lebih banyak. Hal itu membuka pintu terhadap pemenuhan kepentingan yang dimiliki melalui dialog, bukan kekerasan.

Artikel ini juga membahas mengenai kegagalan misi perdamaian sering disebabkan oleh *gender blindness*, di mana tidak diperhatikannya perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan peran dari berbagai aktor dalam wilayah konflik tersebut. Sebagai contoh, perempuan sering diabaikan dalam upaya DDR (*disarmament, demobilization, and reintegration*). Akibat dari hal tersebut, banyak dari mereka yang masih memilih tetap aktif mendukung konflik untuk terus berlangsung. Selain itu, bagi para perempuan yang tidak mendapatkan dukungan finansial dari program *reintegration* atau kerabatnya, mereka cenderung akan mengalami frustrasi dan kemudian memprovokasi terjadinya keributan lain.

Literatur kedua berjudul *UN Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity* yang ditulis oleh Elizabeth F. Defeis dalam jurnal *Washington University Global Studies Law Review Vol. 7 Issue 2* pada

tahun 2008.²³ Fokus dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab kekerasan dan eksploitasi seksual tetap bertahan keberadaannya dan bagaimana hal tersebut kemudian mendorong PBB untuk melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Menurut artikel ini, misi perdamaian secara umum dilakukan di wilayah-wilayah di mana terjadinya kekacauan antar masyarakat sipil, kekosongan hukum, struktur keluarga hancur, dan mengalami kesulitan ekonomi dan psikologis yang mendalam. Dalam situasi tersebut, pemelihara perdamaian (*peacekeeper*) mampu mengerahkan segala kekuatan dan kuasa. Namun, tak jarang kekuatan dan kuasa tersebut disalahgunakan. Faktor utama penyebab kekerasan dan eksploitasi seksual tetap bertahan keberadaannya adalah budaya *hyper-masculine*. Budaya tersebut mendorong dibangunnya *wall of silence* di dalam lingkungan dengan dominasi laki-laki, seperti kepolisian, militer, dan kelompok persaudaraan. Dalam lingkungan tersebut dapat tumbuh ikatan yang mendorong individu saling memberikan perlindungan di dalam dari tuduhan luar.

Dengan banyaknya tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan kepada pasukan perdamaian PBB, Dewan Keamanan PBB kemudian merespon dengan mengeluarkan Resolusi 1325. PBB menyadari adanya kebutuhan penyertaan perspektif gender dalam misi perdamaian, yang kemudian mengarah kepada perluasan peran perempuan dalam misi lapangan. Dalam situasi tertentu, seperti penanganan kasus kekerasan seksual atau kekerasan pada anak-anak, perempuan mampu berperan lebih baik dibandingkan petugas laki-laki. Hal tersebut

²³ E. F. Defeis, "UN Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity," *Washington University Global Studies Law Review* 7 no. 2 (2008): 185-214.

dikarenakan korban merasa lebih tenang, terutama secara emosional, saat berhadapan dengan petugas perempuan.

Literatur ketiga adalah sebuah buku berjudul *The Oxford Handbook of Gender and Conflict* yang diedit oleh Fionnuala Ní Aoláin, Naomi Cahn, Dina Francesca Haynes, dan Nahla Valji.²⁴ Dalam salah satu bab dalam buku ini yang ditulis oleh Dubravka Žarkov, dikemukakan bahwa pentingnya memahami konseptualisasi dari sisi feminis bagaimana perempuan dan kekerasan, termasuk konflik, dapat saling berhubungan. Menurut Žarkov, gelombang feminisme kedua merupakan gelombang yang paling relevan untuk membahas keterkaitan antara perempuan dan konflik, seperti feminisme radikal dan liberal. Feminisme radikal melihat dominasi laki-laki mengakar dari pengendalian dan eksploitasi yang dilakukan laki-laki terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Dapat dikatakan bahwa feminisme radikal menganggap ada keterkaitan antara diskriminasi yang dihadapi perempuan dengan sifat dasar dan faktor biologis manusia.

Di sisi lain, feminisme liberal tidak mengakui sifat dasar dan faktor biologis berhubungan dan operasi yang dilakukan terhadap perempuan. Menurut feminisme liberal, operasi terhadap perempuan terjadi karena ketidaktahuan dan prasangka. Perspektif ini melihat bahwa tugas utama yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi ulang bagi laki-laki dan perempuan untuk mampu mencapai hak-hak yang setara dan menghentikan rintangan-rintangan yang menghalangi jalan bagi perempuan untuk mencapai otonomi dan kesetaraan yang diharapkan.

²⁴ Fionnuala Ní Aoláin, Naomi Cahn, Dina Francesca Haynes, dan Nahla Valji, ed., *The Oxford Handbook of Gender and Conflict* (New York: Oxford University Press, 2018).

Dengan kata lain, feminisme liberal akan cenderung menyerukan integrasi perempuan dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan ulasan tiga literatur di atas, ketiga literatur tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan penulisan. Literatur pertama membahas pentingnya penyertaan perempuan dalam misi perdamaian dan diperhatikannya perempuan terdampak dalam upaya DDR. Literatur kedua membahas penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian dan bagaimana PBB merespon penyimpangan tersebut. Literatur ketiga berfokus pada pentingnya memahami bagaimana pembahasan perempuan dan konflik bisa saling berkaitan. Penulis mendukung argumen-argumen yang telah dipaparkan dalam ketiga literatur tersebut. Meskipun demikian, ketiga literatur di atas belum menyentuh pembahasan mengenai dampak dari datangnya pasukan perempuan ke wilayah terdampak (wilayah tertentu pasca konflik). Oleh karena itu, penelitian yang telah disusun oleh penulis ini diharapkan dapat melengkapi segala pembahasan mengenai keikutsertaan perempuan dalam misi perdamaian, khususnya dari studi kasus kedatangan *Female Formed Police Unit* India ke Liberia.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Creswell, sebuah kerangka teori mampu menyediakan lensa untuk meneliti pertanyaan dalam hal gender, kelas, dan ras (atau isu-isu lain yang membahas kelompok marjinal). Kerangka teori juga mampu membantu penulis dalam hal mengerucutkan isu dan kelompok individu mana dan apa yang paling

penting untuk diteliti.²⁵ Teori dapat diperoleh melalui proses pembangunan yang berawal dari pengumpulan berbagai data, kemudian dilihat tema atau pola besarnya, lalu digeneralisasikan menjadi satu model atau teori.²⁶ Dalam melakukan penelitian mengenai dampak FFPU India terhadap masyarakat Liberia, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang dipandang relevan untuk membantu memaparkan dan menganalisa masalah. Pendekatan utama yang digunakan oleh penulis adalah feminisme yang beranjak dari teori kritis hubungan internasional, yaitu perspektif feminisme liberal, serta konsep *empowerment*.

Akar lahirnya feminisme sudah ada jauh sejak sekitar tahun 1700-an, saat di mana posisi sosial dan ekonomi perempuan Eropa cukup rendah. Saat terjadinya industrialisasi, perlahan dampak kuatnya mulai terasa, yaitu semakin banyak perempuan yang merasa tidak produktif karena hanya bisa tinggal di dalam rumah. Tokoh feminis saat itu adalah Mary Wollstonecraft yang memiliki visi untuk mendorong perempuan menjadi pribadi yang kuat dan mampu membebaskan dirinya dari penindasan melalui pendidikan. Menurutnya, perempuan bukanlah instrumen bagi kemauan laki-laki, tapi perempuan adalah individu rasional yang memiliki harga diri dan kapasitas untuk menentukan dirinya sendiri.²⁷

²⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publications Inc., 2014), 64.

²⁶ *Ibid.*, 65.

²⁷ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 2014), 13-16.

Pemikiran feminis masuk ke dalam hubungan internasional bersamaan dengan lahirnya teori kritis.²⁸ Teori kritis menurut Robert Cox memiliki asumsi bahwa struktur adalah konstruksi sosial dan ada proses historis dibaliknya. Dalam buku *Gendering World Politics* karya J. Ann Tickner, feminis juga memiliki pemikiran yang sama mengenai konstruksi sosial sebuah struktur, namun dalam hal ini adalah gender. Kesamaan juga terletak pada klaim adanya upaya emansipatoris untuk mengubah dominasi struktur tersebut. Feminisme dan teori kritis juga berfokus pada kelompok marjinal politik global dan mengangkat isu-isu yang biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari disiplin ilmu hubungan internasional konvensional.²⁹

Keduanya juga memiliki kesamaan fokus, yaitu pada gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah tatanan politik-ekonomi di dunia yang hegemonik. Melalui lensa tersebut, feminisme ingin memberi tempat bagi perempuan untuk masuk dalam kajian politik internasional serta mengubah tatanan tersebut menjadi lebih berkesetaraan dan berkeadilan. Dengan kata lain, feminisme ingin menempatkan gender sebagai pusat keseluruhan analisis. Namun di sisi lain, feminis juga melakukan kritik terhadap terhadap teori kritis hubungan internasional bahwa mereka terlalu berfokus pada persoalan material dan ekonomi. Menurut feminisme, politik internasional bersifat kompleks dan hierarkis dengan berbagai dimensi, seperti gender, ras, etnis, seksualitas, umur,

²⁸ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2004), 52.

²⁹ J. Ann Tickner, *Gendering World Politics : Issues and Approaches in the Post-Cold War Era* (New York: Columbia University Press, 2001), 32.

dan sebagainya.³⁰ Dengan kata lain, menurut pendekatan feminisme, dunia terlihat dengan cara maskulin yang menguntungkan posisi laki-laki dalam hierarki dan mendevaluasi kontribusi perempuan di dalamnya.³¹

Feminisme mengkaji konsep gender, yaitu pemaknaan mengenai konstruksi sosial yang membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan dipersepsikan oleh sifat maskulin dan feminin. Maskulin identik dengan sifat rasional, independen, kuat, pelindung, dan berperan dalam ranah publik. Sementara feminin identik dengan sifat irasional, emosional, ketergantungan, butuh dilindungi, dan memiliki peran domestik atau pelayanan. Menurut kaum feminis, perbedaan laki-laki dan perempuan seharusnya tidak bersifat biner dan dikotomis. Perempuan bisa memiliki sifat maskulin, laki-laki bisa memiliki sifat feminin, dan keduanya bisa memiliki sifat kombinasi maskulin dan feminin.³²

Perspektif-perspektif yang berkembang dalam feminisme masing-masing memiliki jawaban yang berbeda untuk fenomena yang berbeda pula. Salah satu perspektif feminisme yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah feminisme liberal. Feminis liberal memiliki tujuan untuk melepaskan perempuan dari peranan gender yang bersifat menindas, yang sering menjustifikasi pemberian tempat yang lebih rendah kepada perempuan, atau terkadang tidak diberikan sama sekali.³³ Ketertarikan utama feminis liberal adalah mengintegrasikan perempuan dalam tatanan politik global. Itulah mengapa kajian feminisme liberal sering

³⁰ Ani Soetjipto, *Gender & Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, ed. Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 5.

³¹ Clive Archer, *International Organizations 3rd Edition* (London: Routledge, 2001), 166.

³² Ani Soetjipto, *Op. Cit.*, 8.

³³ Rosemarie Tong, *Op. Cit.*, 34.

menggunakan gender sebagai variabel dalam menganalisis kebijakan keamanan global.³⁴ Sebagian besar teori-teori hubungan internasional memerhatikan sebab dan berakhirnya sebuah perang. Namun, feminis justru lebih memerhatikan fenomena apa yang terjadi selama perang, serta apa akibat dari terjadinya atau berakhirnya perang.

Bagi kaum feminis liberal, *empowerment* adalah cara untuk memperluas pilihan perempuan untuk mampu bersaing, tidak hanya dalam ranah domestik, tapi juga ranah publik. Menurut Linda Alcoff, *empowerment* adalah proses di mana perempuan mulai memercayai kemampuan “untuk mengkonstruksi, dan mengambil tanggung jawab atas, identitas gender mereka, perpolitikan, dan pilihan-pilihan yang mereka miliki.”³⁵

Jean Baker Miller merupakan salah satu tokoh yang mencoba mengaitkan konsep *power* yang terdapat dalam istilah *empowerment*. Menurutnya, *power* tidak harus selalu berkaitan dengan istilah tradisional yang maskulin, penuh kompetisi, dan kontrol. Keterkaitan antara *power* dan *empowerment* yang dimaksud oleh Miller adalah: “*using one’s power to empower another-increasing the other’s resources, capabilities, effectiveness, and ability to act.*”³⁶ Peggy Andrews juga menjelaskan secara lebih jauh bahwa *empowerment* sangat berbeda dari dominasi, eksploitasi, opresi, dan kekuasaan otoriter. Konsep *empowerment*

³⁴Ani Soetjipto, *Op. Cit.*, 12.

³⁵ Barbara Rowland-Serdar dan Peregrine Schwartz-Shea, “Empowering Women: Self, Autonomy, and Responsibility,” *The Western Political Quarterly* 44 no. 3 (1991): 607.

³⁶ Patricia SE Darlington dan Becky Michele Mulvaney, “Gender, Rhetoric, and Power: Toward a Model of Reciprocal Empowerment,” *Women’s Studies in Communication* 25 no. 2 (2002): 151.

yang berusaha ia jelaskan adalah suatu hasil yang dicapai melalui adanya upaya *compassion, competence, consensus, cooperating, dan community*.³⁷

Dengan menggunakan perspektif feminisme liberal, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pasukan perdamaian perempuan dari India mencoba membantu melepaskan perempuan Liberia dari tindak penindasan yang menempatkan perempuan dalam posisi, status, dan peranan yang lebih rendah, atau tidak diberikan sama sekali. Lalu, dengan konsep *empowerment*, penelitian berusaha menjelaskan bagaimana dampak kedatangan pasukan perdamaian perempuan dari India tersebut mampu menginspirasi perempuan-perempuan Liberia untuk meraih kehidupan yang lebih baik, baik dalam hal rasa aman, pendidikan, maupun pekerjaan.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami dan memaknai fenomena sosial dan bentuk interaksi melalui perspektif tertentu.³⁸ Fokus penelitian ada pada persepsi penulis terhadap fenomena yang tentu dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Sementara sumber data utama metode ini berasal dari teks (kata-kata) atau

³⁷ *Ibid.*, 152,

³⁸ John W. Creswell, *Op. Cit.*, 205.

literatur.³⁹ Oleh karena itu, sumber data penulis berasal dari sekumpulan dokumen, jurnal, buku, laporan, berita, dan bentuk literatur lainnya.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis subjek penelitian dan menjelaskan hubungan sebab-akibat dari suatu kasus menggunakan sumber data-data yang telah dikumpulkan.⁴⁰ Oleh karena itu, penelitian ini membahas hubungan sebab-akibat dari kedatangan FFPU India terhadap masyarakat Liberia, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menunjang penulisan penelitian, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data-data primer dikumpulkan melalui situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa definisi, dokumen resolusi, laporan, dan statistik pasukan perdamaian. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka berupa jurnal, buku, artikel, berita, dan laporan dari berbagai institusi, penulis, dan kantor berita.

³⁹ *Ibid.*, 206.

⁴⁰ Tim Penyusun Unpar, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), 18.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I – Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis memaparkan latar belakang dan identifikasi masalah terhadap penulisan penelitian yang membahas tentang munculnya kebutuhan akan pengintegrasian lebih banyak perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Diawali oleh permasalahan personel perdamaian laki-laki yang beberapa kali ditemukan sebagai pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan di wilayah pasca konflik. Bab I ini terbagi ke dalam tujuh sub-bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II – Pasukan Pemelihara Perdamaian dan Disparitas Gender di Dalamnya

Di dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana awal mula dibentuknya pasukan pemelihara perdamaian dan bagaimana disparitas gender dalam komposisi pasukan menimbulkan permasalahan tertentu. Permasalahan dari disparitas gender yang dibahas secara mendalam di bab ini adalah mengenai kekerasan dan eksploitasi seksual.

Bab III – Terbentuknya FFPU dan Kontribusinya dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian Liberia

Pada bagian ini, penulis menjelaskan bagaimana munculnya permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual kemudian mendorong keikutsertaan

perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian, demi menyediakan respon yang lebih efektif terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, penulis membahas kedatangan *Female Formed Police Unit* India ke misi pemeliharaan perdamaian di Liberia beserta upaya-upaya yang mereka lakukan selama misi berlangsung.

Bab IV – Analisis Dampak Kedatangan *Female Formed Police Unit* India ke Liberia dengan Perspektif Feminisme Liberal

Dalam bagian ini, penulis melakukan analisis dari upaya dan dampak yang ditimbulkan dari kedatangan FFPU India selama masa kerjanya sebagai pasukan pemelihara perdamaian di Liberia dengan menggunakan perspektif feminisme liberal dan konsep *empowerment*.

Bab V – Kesimpulan

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian dan data-data yang diperoleh selama penelitian.